

Peran Kapasitas Fiskal, Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat: Studi Lintas Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan

*Jannes Samuel Elfronzo Abhimaël Panggabean¹, Agung Mahendra²,
Kurniasih Jati Setyaningsih³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Immanuel

*corresponding email: jannes@ukrimuniversity.ac.id

ARTICLE INFO

Article Received

24 September 2025

Article Revised

16 Oktober 2025

Article Accepted

29 Oktober 2025

Keywords

Fiscal Capacity, Fiscal
Dependency, Local
Government Expenditure,
Human Development
Index, Fiscal Federalism

DOI:

<https://doi.org/10.61179/ejba.v19i2.789>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh kapasitas fiskal, dependensi fiskal pada pemerintah pusat, dan belanja daerah terhadap kualitas hidup masyarakat pada 56 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan adalah Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk mengevaluasi hubungan langsung dan efek moderasi belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Belanja daerah tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap IPM. Namun, belanja daerah memoderasi hubungan PAD dan IPM secara negatif, serta memoderasi hubungan TKD dan IPM secara positif dan signifikan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kapasitas fiskal dalam meningkatkan kualitas hidup sangat bergantung pada kualitas tata kelola belanja daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal dan mengarahkan belanja pada sektor produktif yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia.

ABSTRACT

This study investigates the effects of fiscal capacity, fiscal dependency on the central government, and local government expenditure on community quality of life across 56 regencies/municipalities in Kalimantan Island from 2019 to 2023.

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) was employed to examine both direct effects and the moderating role of local expenditure. The empirical findings reveal that Local Own-Source Revenue (PAD) has a positive and significant effect on the Human Development Index (HDI), while Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) exert a significant negative effect. Local government expenditure shows no direct significant effect on HDI. However, expenditure negatively moderates the relationship between PAD and HDI, and positively moderates the effect of TKD on HDI. These results highlight that the effectiveness of fiscal capacity in improving human development largely depends on the quality of public spending. Strengthening fiscal autonomy and prioritizing productive expenditures are essential to enhancing community welfare outcomes.

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan orientasi sentral dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional maupun regional, sebab hal tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan mendasar negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk “memajukan kesejahteraan umum”. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah negara Indonesia adalah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal adalah proses pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sofilda *et al.*, 2023).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber daya fiskal secara lebih otonom, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Nugroho & Candrawati, 2025). Konsekuensi logis dari kebijakan ini adalah meningkatnya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk memiliki kapasitas pendanaan yang mandiri, sehingga tidak semata bergantung pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat (Pabayo, 2025). Kemandirian dalam pendanaan tersebut berimplikasi pada tercapainya kemandirian fiskal, yakni kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah menurut Undang-Undang dan Ketentuan Pemerintah. Dari perspektif fiskal, kemandirian daerah dan ketergantungan pada transfer pusat memainkan peranan penting dalam menentukan ruang fiskal untuk belanja publik yang menasar pada dimensi-dimensi pembangunan manusia.

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk mengukur kualitas hidup adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Panggabean & Matondang, 2019). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), terdapat tiga dimensi kunci IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pencapaian pada ketiga dimensi tersebut sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang memadai, yang pada dasarnya didukung oleh kemampuan pembiayaan daerah. Melalui mekanisme pendapatan asli daerah, transfer fiskal dari pemerintah pusat, serta pengelolaan belanja publik, pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam menentukan tingkat akses dan kualitas layanan dasar yang diterima masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kualitas hidup tidak hanya menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan tata kelola fiskal, di mana efektivitas pembiayaan daerah menjadi faktor penentu apakah pembangunan benar-benar mampu mendorong peningkatan IPM secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fiskal, tetapi juga bagaimana kemampuan fiskal itu dimanfaatkan. Pemerintah daerah diharapkan mampu

mengarahkan belanja daerah secara strategis pada sektor-sektor esensial yang berkaitan langsung dengan peningkatan nilai IPM, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik dasar. Dengan demikian, belanja daerah tidak sekedar instrumen administratif, tetapi juga merupakan alat kebijakan yang menentukan arah dan kesejahteraan hidup masyarakat (Arfandi *et al.*, 2024).

Dalam konteks kewilayahan, kabupaten dan kota yang ada di Pulau Kalimantan dihadapkan pada dinamika tersendiri dalam kapasitas fiskal dan efektivitas belanja daerah. Walaupun sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, namun berdasarkan data Kementerian Keuangan, masih tampak disparitas fiskal di sejumlah daerah. Mengingat posisi Kalimantan yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional, urgensi untuk meningkatkan kapasitas fiskal serta memperkuat kebijakan belanja daerah yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan lokal semakin mengemuka. Langkah ini menjadi krusial guna memastikan bahwa pembangunan di Kalimantan tidak semata terfokus pada proyek-proyek berskala nasional, melainkan juga menjangkau seluruh kabupaten dan kota secara merata. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat terealisasi dan berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia di seluruh penjuru Pulau Kalimantan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas fiskal dan dependensi fiskal pada pemerintah pusat terhadap IPM. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu belanja daerah. Penelitian serupa telah menarik perhatian berbagai peneliti. Ramdan *et al.* (2025) mengkaji pengaruh PAD, DAU, dan Investasi Swasta terhadap IPM dengan melibatkan belanja langsung sebagai variabel intervening. Hasilnya menunjukkan bahwa, baik secara parsial maupun simultan, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Selanjutnya, belanja langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan investasi swasta berpengaruh negatif namun signifikan terhadap IPM. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, dan Investasi Swasta secara simultan mempengaruhi IPM dengan

belanja langsung sebagai variabel intervening. Penelitian Isman *et al.* (2025) mengonfirmasi bahwa PAD dan DAK berpengaruh signifikan dalam meningkatkan IPM, sedangkan DAU tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian Fahriza & Ariani (2023) dilakukan untuk menguji pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap IPM dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa PAD dan dana perimbangan masing-masing mempengaruhi IPM, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Di samping itu, belanja modal ditemukan berpengaruh terhadap IPM, namun tidak memediasi pengaruh PAD terhadap IPM maupun dana perimbangan terhadap IPM.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Federalisme Fiskal

Teori federalisme fiskal menyediakan dasar konseptual untuk memahami pembagian fungsi dan tanggungjawab fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oates (1999) menjelaskan bahwa teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan preferensi masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian, pembagian fungsi fiskal antar tingkat pemerintahan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Teori ini menekankan tiga pilar utama, yakni pembagian tanggungjawab pengeluaran publik, kewenangan dalam pemungutan pendapatan daerah, dan mekanisme transfer antar tingkat pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar wilayah (Musgrave, 1959 dalam Oates, 1999). Pelimpahan otonomi fiskal kepada daerah dianggap dapat mendorong inovasi kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas publik, karena masyarakat lokal dapat menilai secara langsung hasil dari kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, teori federalisme fiskal menekankan perlunya merawat keseimbangan antara tingkat kemandirian fiskal daerah

dengan koordinasi yang efektif antar aras pemerintahan. Desentralisasi yang tidak disertai dengan kemampuan fiskal yang memadai berpotensi menimbulkan ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga dapat melemahkan esensi dari otonomi daerah. Oleh karena itu, teori ini tidak sekedar berfokus pada distribusi fungsi fiskal, tetapi juga menegaskan pentingnya rancangan kelembagaan yang mampu meminimalkan kesenjangan antar wilayah serta mendorong efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kualitas Hidup Masyarakat

Variabel kualitas hidup masyarakat pada penelitian ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang merupakan indikator komposit yang merangkum capaian rata-rata pembangunan manusia pada dimensi-dimensi utama pembangunan. Terdapat tiga ukuran utama yang merupakan dimensi pengukur IPM, yaitu usia dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (UNDP, 2024). Dimensi kesehatan dalam IPM direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup saat lahir, sementara dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas serta harapan lama sekolah bagi anak-anak pada usia sekolah. Selanjutnya, dimensi standar hidup diukur berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita. Dalam proses penghitungan, IPM menerapkan logaritma pendapatan guna mencerminkan penurunan marginal dari kontribusi pendapatan terhadap pembangunan manusia seiring dengan meningkatnya tingkat PNB per kapita. Nilai dari ketiga dimensi tersebut kemudian digabungkan menjadi satu indeks komposit melalui pendekatan rata-rata geometrik.

Di Indonesia, data IPM dihimpun dan dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang setiap

tahunnya menyajikan capaian IPM nasional maupun regional hingga tingkat kabupaten/kota. Data tersebut menjadi rujukan utama dalam analisis pembangunan daerah karena mampu mencerminkan capaian pembangunan sosial dan ekonomi secara terintegrasi. Penggunaan IPM dalam penelitian ekonomi regional memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal, kemandirian daerah, dan alokasi belanja publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, IPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator hasil pembangunan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan publik dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai fungsi publik dan program pembangunan. Secara konseptual, kapasitas fiskal tidak hanya mengukur besaran pendapatan, tetapi juga mencerminkan kemampuan struktur fiskal lokal untuk memanfaatkan pendapatan (Choi, 2021). Dalam konteks Indonesia, ukuran kapasitas fiskal yang umum digunakan adalah PAD. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan PAD sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang kuat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk akselerasi pembangunan, memperluas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan

kapasitas fiskal rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam membiayai program pembangunan dan bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Dalam perspektif teori federalisme fiskal, kapasitas fiskal mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang menjadi fondasi utama dalam penerapan otonomi daerah yang efektif (Oates, 1999).

Dependensi Fiskal

Dalam kerangka teori federalisme fiskal, transfer antar pemerintah merupakan instrumen utama untuk mengoreksi ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal, sekaligus memastikan pemerataan layanan publik dasar di seluruh wilayah (Oates, 1999). Namun, secara empiris, besarnya transfer yang diterima oleh pemerintah daerah juga sering mencerminkan tingkat dependensi (ketergantungan) fiskal terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini muncul ketika daerah terlalu mengandalkan dana transfer dan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memobilisasi sumber pendapatan asli (Lewis, 2023).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan penting dalam mendukung belanja modal dan pembangunan infrastruktur, efeknya terhadap kemandirian daerah masih terbatas (Aritenang, 2020). Wirandana & Khoirunurrofik (2024) bahkan menemukan bahwa efektivitas transfer dalam mengurangi ketimpangan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, sangat bergantung pada desain kebijakan dan kapasitas manajerial pemerintah daerah.

Dengan demikian, dalam konteks teori federalisme fiskal, dependensi fiskal tidak hanya menggambarkan hubungan transfer pusat-daerah secara administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana desentralisasi keuangan benar-benar memberikan otonomi fiskal yang

substantif. Semakin besar proporsi transfer terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula indikasi ketergantungan fiskal, yang pada akhirnya dapat membatasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Belanja Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam kerangka teori federalisme fiskal, belanja publik di tingkat lokal merupakan refleksi kemampuan daerah untuk menyediakan layanan publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan warganya (Oates, 1999). Penelitian ini menggunakan total realisasi belanja daerah sebagai ukuran belanja pemerintah, bukan hanya pada jenis belanja tertentu. Berdasarkan teori federalisme fiskal, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal, yang mencakup belanja investasi maupun operasional (Oates, 1999). Dengan demikian, total belanja daerah mencerminkan perilaku fiskal dan kapasitas pelayanan publik secara lebih komprehensif. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada investasi fisik, tetapi juga pada pengeluaran sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi (Miranda-Lescano *et al.*, 2023; Sofilda *et al.*, 2023). Mengingat variasi komposisi anggaran antar daerah di Indonesia, penggunaan total belanja daerah memberikan gambaran yang lebih akurat atas upaya fiskal pemerintah daerah dan mengurangi potensi bias jika hanya berfokus pada belanja modal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Kemandirian fiskal yang tercermin dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik yang menunjang dimensi-dimensi IPM seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Oates, 1999). Studi tingkat sub-nasional di Indonesia menunjukkan bahwa PAD yang lebih besar mendukung pembangunan manusia, sehingga berpotensi meningkatkan nilai IPM (Fahriza & Ariani, 2023; Isman *et al.*, 2025; Pratama *et al.*, 2025; Ramdan *et al.*, 2025; Sofilda *et al.*, 2023). Oleh karena itu, hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Pengaruh Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Menurut teori federalisme fiskal (Oates, 1999), transfer antar-pemerintah dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan fiskal dan menjamin pemenuhan layanan dasar di daerah yang memiliki kemampuan fiskal tidak optimal. Secara empiris, *intergovernmental transfers* dapat memberi dampak positif pada IPM apabila dana dialokasikan dan dikelola dengan baik (Aritenang, 2020; Jin & Jakovljevic, 2023). Oleh karena itu, diasumsikan bahwa transfer ke daerah berpengaruh terhadap IPM, meskipun arah dan besarnya efek dapat bergantung pada kualitas alokasi dan kapasitas administrasi daerah. Dengan demikian, hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Dependensi pada Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Belanja daerah merupakan saluran nyata bagi realisasi kebijakan fiskal daerah dan menentukan output layanan publik yang relevan bagi IPM melalui alokasi ke sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian lintas-negara serta studi regional menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan pada berbagai

tingkatan pemerintahan berkontribusi terhadap peningkatan IPM dan komponennya (Miranda-Lescano *et al.*, 2023). Studi-studi di Indonesia juga menunjukkan keterkaitan antara pola belanja daerah dan hasil pembangunan manusia (Arfandi *et al.*, 2024; Ramdan *et al.*, 2025). Oleh karena itu hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderasi

Dalam kerangka teori federalisme fiskal, otonomi fiskal daerah (termasuk kapasitas pendapatan dan sumber daya yang dimiliki daerah) bersama dengan tanggungjawab belanja daerah dipandang sebagai kunci dalam memaksimalkan hasil pembangunan manusia (Oates, 1999). Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada bagaimana belanja publik dialokasikan dan digunakan. Artinya, variabel belanja daerah bukan hanya eksese jumlah belanja, tetapi juga kualitas alokasi dan pengelolaan. Oleh karena itu, hipotesis 4 dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Belanja Daerah Memoderasi Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

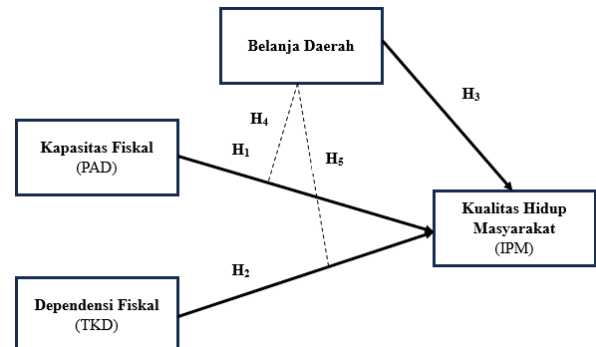
Pengaruh Dependensi Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderasi

Dalam kerangka teori federalisme fiskal, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat berpotensi mengurangi insentif daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan fiskal dan menekan efisiensi belanja publik, kondisi yang dikenal sebagai fiscal dependency. Temuan empiris pada penelitian Hung & Thanh (2022), berdasarkan analisis panel pada 18 negara, juga menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal mampu mendorong peningkatan pembangunan manusia, dampak tersebut dapat berbalik menjadi tidak efektif apabila komposisi pengeluaran daerah cenderung tidak produktif. Oleh karena itu, kualitas tata kelola belanja daerah menjadi

penentu utama yang dapat memperlemah bahkan mengoreksi pengaruh negatif ketergantungan fiskal terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis 5 dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Belanja Daerah Memoderasi Pengaruh Dependensi Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

**Gambar 1
Model Penelitian**



3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan bukti empiris mengenai peran PAD dan dana transfer dari pemerintah pusat terhadap IPM dimoderasi oleh belanja daerah di tingkat kabupaten/kota pada wilayah Pulau Kalimantan. Objek penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota yang tersebar di lima provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan jumlah keseluruhan 56 unit observasi.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode sampel jenuh, karena seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut dijadikan unit analisis sebagai periode pengamatan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2019 hingga 2023. Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

untuk data PAD, transfer ke daerah, dan belanja daerah, serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data IPM kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Data diolah menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4 melalui pendekatan Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS), karena sesuai untuk model dengan variabel laten dan hubungan yang bersifat prediktif.

Tahapan analisis meliputi evaluasi model pengukuran dan model struktural. Pada model struktural, pengujian dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R-Square) untuk menilai kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, Goodness of Fit untuk menguji kesesuaian model secara keseluruhan, serta path analysis dengan teknik bootstrapping untuk menguji signifikansi hubungan antarvariabel, termasuk pengaruh moderasi interaksi antara PAD dan belanja daerah serta antara TKD dan belanja daerah terhadap IPM. Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan nilai t-statistic, p-value, dan arah koefisien jalur untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Model Struktural (Inner Model)

Hasil Uji R-Square

Koefisien determinasi (R-square) merepresentasikan proporsi variasi pada variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen yang memengaruhinya (Hadiuwito *et al.*, 2025). Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel laten independen mampu menjelaskan atau memberikan pengaruh terhadap variabel laten dependen dalam suatu model penelitian. Secara umum, tingkat kekuatan nilai R-square diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni kuat apabila nilai R^2 mencapai 0,75, moderat apabila bernilai 0,50, dan lemah apabila hanya sebesar 0,25.

Hasil Uji Hipotesis

Table 1. R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
IPM	0.563	0.555

Hasil estimasi koefisien determinasi (R-square) menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Belanja Daerah—termasuk peran moderasinya—mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,563 atau 56,3%. Temuan ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang berada pada kategori moderat, sebagaimana kisaran nilai R^2 antara 0,50 hingga 0,75. Artinya, masih terdapat sekitar 43,7% variasi IPM yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Adapun nilai R-square adjusted sebesar 0,555 menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel, model tetap menunjukkan tingkat kestabilan dan akurasi prediksi yang cukup baik.

Hasil Uji Goodness of Fit

Hasil evaluasi *model fit* menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria kecocokan yang baik terhadap data empiris. Nilai SRMR sebesar 0,028 berada jauh di bawah ambang batas 0,08, yang mengindikasikan bahwa perbedaan antara kovarian yang diobservasi dan kovarian yang diprediksi oleh model sangat kecil, sehingga model dapat dinyatakan memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik (Hair *et al.*, 2021). Sementara itu, nilai Normed Fit Index (NFI) sebesar 0,978 memperkuat temuan tersebut, karena melampaui batas minimum 0,90 dan mendekati nilai ideal 1,0 yang menandakan bahwa model yang diusulkan memiliki kecocokan yang sangat kuat terhadap data. Dengan demikian, hasil ini mengonfirmasi bahwa model struktural yang diuji layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Table 2. Goodness of Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.000	0.028
NFI	1.000	0.978

Table 3. Hasil Perhitungan *Bootstrapping*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Belanja Daerah -> IPM	0.091	0.063	0.149	0.609	0.543
Belanja Daerah x PAD - > IPM	-0.235	-0.256	0.056	4.186	0.000
Belanja Daerah x TKD - > IPM	0.079	0.091	0.034	2.291	0.022
PAD -> IPM	0.923	0.943	0.063	14.712	0.000
TKD -> IPM	-0.251	-0.238	0.124	2.032	0.042

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Berdasarkan data hasil *bootstrapping* yang disajikan pada tabel 3, pengujian pada variabel kapasitas fiskal yang diproksikan dengan PAD terhadap kualitas hidup masyarakat yang diproksikan dengan IPM menghasilkan nilai t-statistic 14,712, yang jauh lebih besar dari batas 1,98, dengan p-value 0,000. Nilai original sample 0,923 menunjukkan arah pengaruh positif yang kuat. Dengan demikian, hipotesis 1 terdukung, yang mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengaruh Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Berdasarkan data hasil *bootstrapping* yang disajikan pada tabel 3, pengaruh dependensi fiskal pada pemerintah pusat yang diproksikan dengan TKD terhadap kualitas hidup masyarakat yang diproksikan dengan IPM memiliki t-statistic 2,032 ($> 1,98$) dan p-value 0,042 ($< 0,05$), dengan nilai original sample $-0,251$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 terdukung, meskipun arah pengaruhnya negatif, yang mengimplikasikan bahwa TKD belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Berdasarkan data hasil *bootstrapping* yang disajikan pada tabel 3, nilai t-statistic untuk pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM adalah 0,609, yang lebih kecil dari 1,98 (t-tabel), serta memiliki p-value sebesar 0,543, lebih besar dari 0,05. Nilai original sample

sebesar 0,091 menunjukkan arah pengaruh positif, namun tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis 3 tidak terdukung, yang berarti Belanja Daerah tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Efek Moderasi Belanja Daerah pada Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Berdasarkan data hasil *bootstrapping* yang disajikan pada tabel 3, pengaruh interaksi Belanja Daerah dan PAD terhadap IPM memperoleh nilai t-statistic 4,186, lebih besar dari 1,98, serta p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai original sample $-0,235$ menunjukkan bahwa efek moderasi tersebut signifikan dengan arah negatif. Oleh karena itu, hipotesis 4 terdukung, yang menunjukkan bahwa Belanja Daerah mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap IPM, meskipun arah pengaruhnya mengindikasikan adanya penguatan dengan kecenderungan menurunkan besaran pengaruh.

Efek Moderasi Belanja Daerah pada Pengaruh Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Berdasarkan data hasil *bootstrapping* yang disajikan pada tabel 3, pengaruh interaksi Belanja Daerah dan TKD terhadap IPM menunjukkan nilai t-statistic 2,291 ($> 1,98$) dan p-value 0,022 ($< 0,05$). Nilai original sample 0,079 menunjukkan arah pengaruh positif. Dengan demikian, hipotesis 5 terdukung, yang berarti Belanja Daerah memiliki kemampuan memperkuat pengaruh TKD terhadap IPM.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang diproksikan dengan PAD berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Temuan ini mendukung prinsip utama teori federalisme fiskal yang menekankan pentingnya *revenue autonomy* dalam mendukung penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Sejalan dengan argumen Oates (1999), kapasitas fiskal yang bersumber dari potensi ekonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penguatan PAD berkontribusi langsung pada capaian pembangunan manusia melalui peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan pengaruh signifikan tetapi dengan arah negatif terhadap IPM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat dapat menurunkan insentif pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan lokal serta efisiensi alokasi belanja. Temuan ini sejalan dengan fenomena ketergantungan fiskal dalam literatur federalisme fiskal (Oates, 1999), di mana daerah yang terlalu mengandalkan dana transfer cenderung kurang inovatif dalam mengelola fiskal secara produktif sehingga manfaat pembangunan menjadi kurang maksimal. Dengan kata lain, keberadaan transfer fiskal tidak menjamin peningkatan kualitas hidup bila tidak dibersamai dengan tata kelola yang akuntabel dan berbasis kinerja.

Berbeda dengan ekspektasi teoretis dan hasil penelitian terdahulu, variabel belanja daerah pada penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil ini memberikan indikasi bahwa struktur pengeluaran publik di banyak daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebaliknya, alokasi belanja yang lebih dominan untuk belanja pegawai dan pengeluaran rutin dapat melemahkan fungsi anggaran sebagai instrumen peningkatan pembangunan manusia. Temuan ini mengonfirmasi kritik dalam federalisme fiskal bahwa *expenditure autonomy* tidak selalu menghasilkan efisiensi bila kualitas tata kelola belanja rendah.

Pada aspek moderasi, interaksi antara Belanja Daerah dan PAD berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja justru berpotensi menurunkan efektivitas pemanfaatan PAD terhadap pembangunan manusia. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakefisienan belanja dan kemungkinan ilusi fiskal, yakni ketika peningkatan kapasitas fiskal tidak diimbangi dengan penyusunan prioritas anggaran yang tepat sasaran, sehingga manfaat belanja menjadi tidak optimal.

Sebaliknya, interaksi antara Belanja Daerah dan TKD memberikan pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Temuan ini sejalan dengan fungsi *equalization grant* dalam teori federalisme fiskal yang menyatakan bahwa transfer dapat meningkatkan kesejahteraan asalkan direalisasikan melalui alokasi belanja yang produktif dan tepat sasaran. Dengan demikian, efisiensi penggunaan dana transfer menjadi kunci dalam memaksimalkan dampak pembangunan manusia di daerah yang masih membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal daerah yang direpresentasikan oleh PAD, dependensi pada pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh TKD, serta belanja daerah terhadap kualitas hidup masyarakat yang direpresentasikan dengan IPM, dengan mempertimbangkan peran belanja daerah sebagai variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sehingga memperkuat argumen dalam teori federalisme fiskal bahwa peningkatan kapasitas fiskal lokal memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan publik secara lebih responsif. Dengan demikian, efektivitas PAD dalam mendukung pembangunan manusia mengindikasikan semakin tingginya kemandirian fiskal daerah dan kemampuan dalam menyediakan pelayanan publik yang

berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, TKD menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap IPM. Hasil ini mengimplikasikan bahwa meskipun transfer pusat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan yang berlebihan justru berpotensi menurunkan inovasi dan akuntabilitas daerah dalam mengelola pembangunan. Selain itu, belanja daerah tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa ekspansi anggaran belum tentu terkonversi menjadi peningkatan kualitas hidup apabila komposisi belanja didominasi oleh pengeluaran yang kurang produktif atau tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik esensial.

Temuan lebih lanjut menegaskan bahwa belanja daerah memainkan peran kunci sebagai moderasi. Moderasi negatif pada hubungan antara PAD dan IPM mengisyaratkan ketidakefisienan dalam pengalokasian belanja publik yang seharusnya memperkuat manfaat fiskal lokal. Sebaliknya, moderasi positif pada hubungan antara TKD dan IPM menegaskan pentingnya belanja daerah sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa transfer pusat benar-benar memberikan manfaat sosial yang terukur. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah menjadi faktor penentu efektivitas kapasitas fiskal, baik yang bersumber dari PAD maupun TKD, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka federalisme fiskal yang menempatkan otonomi dan efektivitas belanja sebagai fondasi pemerintahan daerah yang adaptif dan berorientasi hasil.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini menekankan perlunya strategi penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang diiringi dengan tata kelola belanja yang lebih produktif. Pemerintah pusat juga perlu merancang mekanisme transfer fiskal

yang memberikan insentif atas capaian layanan publik, bukan sekadar menutup kesenjangan fiskal. Optimalisasi belanja pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi keharusan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi sistem monitoring kinerja anggaran yang lebih kuat juga menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa setiap belanja publik mampu menghasilkan dampak pembangunan manusia yang nyata.

6. REFERENSI

- Arfandi, S., Hasanuddin, B., Madris, & Saudi, N. D. S. (2024). The Effect of Government Expenditure on the Human Development Index. *Proceedings of the 9th International Conference on Accounting, Management, and Economics (ICAME)*, 2944–2951. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8>
- Aritenang, A. F. (2020). The Effect of Intergovernmental Transfers on Infrastructure Spending in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(3), 571–590. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1675352>
- Choi, N. H. (2021). Analyzing local government capacity and performance: Implications for sustainable development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3862). <https://doi.org/10.3390/su13073862>
- Fahriza, M. R., & Ariani, K. R. (2023). The Influence of Local Own Income and balanced Fund on HDI With Capital Expenditure as an Intervening Variable in Districts / Cities of Central Java (2019-2021). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 03, 187–201. www.ajhssr.com
- Hadisuwito, M. S., Yokanan, R. T., &

- Kaloeti, A. K. (2025). The Effect of Inclusive Leadership on Innovative Work Behavior Mediated By Perceived Organizational Support. *Phinisi*, 02(03), 83–96. <https://doi.org/10.64282/phi.v2i3.98>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_7
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development: Empirical Evidence Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development: Empirical Evidence. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Isman, M. H. S., Salomo, R. V., & Bakri, M. R. (2025). Impact of Fiscal Transfers and Local Revenue Accountability on Community Welfare in Indonesia. *Owner*, 9(2), 1407–1416. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2684>
- Jin, H., & Jakovljevic, M. (2023). Fiscal Decentralization and the Human Development Index: A Cross-Border Empirical Study. *Sustainability (Switzerland)*, 15(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su15118784>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human Development and Decentralization: The Importance of Public Health Expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(1), 191–219. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Nugroho, A. A., & Candrawati, C. (2025). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Pemekaran: Studi Kasus pada Provinsi Sulawesi Barat. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 046–057. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/26656>
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Pabayo, A. S. T. (2025). The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Panggabean, M., & Matondang, E. R. L. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding SATIESP*, 154–164. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/13-Meiran.pdf>
- Pratama, N. S., Hamzani, U., Muhsin, M., Rusliyawati, R., & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(1), 16–26. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i1.1080>
- Ramdan, N. A., Liana, S., & Lukita, C. (2025). Pengaruh PAD, DAU, dan Investasi Swasta terhadap IPM

- dengan Belanja Langsung sebagai Variabel Intervening di Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 137–151.
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of Fiscal Decentralisation, Human Development, and Regional Economic Growth in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- UNDP. (2024). Human Development Report 2023-24. In *United Nations Development Programme*. <http://report.hdr.undp.org>
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2024). Educational Inequality in Indonesia: Are Intergovernmental Fiscal Transfers Effective in Reducing the Gap? *Educational Studies*, 50(6), 1424–1443. <https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647>